



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 21 Agustus 2019

Halaman: 1

Ruang di DPUPKP Pemkot Disegel

ADA satu ruangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam pengawasan KPK. Ruangan tersebut yakni Ruang Rapat (RR) Bidang Sumber Daya Alam (SDA) 1 yang terletak di lantai 3 Kantor DPUPKP Kota Yog-

yakarta.
Pantauan reporter Tribun Jogja, ada bagian pintu ruangan RR Bidang SDA 1 DPUPKP Pem-

• ke halaman 7

Ruang di DPUPKP Pemkot

• Sambungan Hal 1

kot Yogyakarta yang disegel pakai stiker bertuliskan "DALAM PENGAWASAN KPK" dengan logo KPK pada bagian kiri atasnya.

Ruang rapat tersebut diketahui juga berfungsi sebagai ruang kerja ASN yang berasal dari Bidang SDA DPUPKP yang dijemput KPK.

Selain itu, ada juga laci yang dilabeli stiker serupa, yang berada di ruang kerja Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta, lokasinya di gedung terpisah dari DPUPKP Kota Yogyakarta, namun berada satu kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengatakan, ada dua PNS Pemkot Yogyakarta yang dijemput KPK, Senin (20/8).

"Ada dua orang rekan ker-

ja kami yang dimintai keterangan. Karena proyek yang di-OTT ada di wilayah hukum Kota Yogyakarta," ujarnya, saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya, kemarin.

Proyek tersebut merupakan proyek pengerjaan drainase yang berada di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Haryadi, menjelaskan, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan Pemkot Yogyakarta dengan Kejari Kota Yogyakarta yang masuk dalam Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). "TP4D itu untuk menghindarkan potensi pelanggaran hukum dalam setiap pekerjaan. Saya prihatin menyikapi kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam sebuah kemasan TP4D. TP4D ada agar pemerintah dapat mengantisipasi KKN," ungkapnya.

Pengawasan lemah

• Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menyesalkan adanya unsur PNS yang ikut terjaring OTT KPK.

Padahal, seluruh PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta telah mendatangi pakta integritas.

"Pakta integritas jangan hanya dimaknai hanya selembar kertas tetapi harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan," ujarnya.

Lanjutnya, dengan adanya OTT KPK di Yogyakarta, bukti adanya persoalan yang menjadi sorotan KPK. "Yang selama ini dianggap KPK sulit melakukan OTT di Yogyakarta tetapi akhirnya dapat pecah telur," kata dia.

Ia, menyampaikan, OTT KPK terhadap unsur PNS ini menjadi bukti bahwa pengawasan internal masih lemah. "OTT KPK diharapkan menjadi pintu masuk mendalam keterlibatan pihak lain dalam kasus ini," terangnya. (kur/era)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005